

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA SAGULING KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

Santi Nuramalia¹, Kiki Endah², Dini Yuliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : santinuramalia@gmail.com

ABSTRAK

Hasil observasi diketahui bahwa implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum optimal, hal ini terlihat dari kurangnya penyiapan data penerima manfaat dan penyiapan e-warung. Contohnya : Masih banyaknya masyarakat yang berhak mendapat bantuan namun tidak memperoleh bantuan BPNT serta adanya e-warung yang ditunjuk padahal sebelumnya bukan warung, dalam hal penyaluran barang tidak sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Contohnya banyaknya pemasok komoditi dalam program BPNT sehingga menyebabkan banyaknya komoditi yang terlambat datang ke agen sehingga memperlambat proses penyaluran kepada KPM, Pembelian barang sudah ditentukan oleh e-warung. Contohnya setiap bulan KPM memperoleh bantuan dengan komoditi yang sama padahal KPM belum tentu membutuhkannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum terlaksana secara optimal sesuai dengan pendapat Purwanto dan Sulystiastuti (2014:106) tentang indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas implementasi kebijakan hal ini dikarenakan kurang mengetahui kondisi kelompok sasaran secara langsung ke lapangan, masyarakat kurang mengetahui tempat pendistribusian BPNT, kurang cermat dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat kelompok sasaran, kurangnya perivikasi data terhadap kelompok masyarakat yang berhak menerima BPNT, kurangnya informasi dalam pendistribusian BPNT dari agen penyalur, kurang koordinasi sehingga rentang adanya penyimpangan, kurang aktif menyampaikan informasi jadwal pendistribusian BPNT, pendamping desa kurang fokus dalam melaksanakan pendistribusian BPNT, komoditi yang di distribusikan sudah ditentukan tanpa adanya identifikasi terlebih dahulu dari pendamping desa.

Kata Kunci : *Implementasi, Program Bantuan Pangan Non Tunai*

PENDAHULUAN

Prioritas utama pembangunan adalah menyediakan bahan pangan terutama beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau untuk keluarga miskin. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Dari sekian banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia, namun hingga saat ini belum benar-benar terlepas dari masalah kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga sangat miskin.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Dalam Pedoman Umum BPNT (2019:7) dinyatakan bahwa :

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang

telah bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus. Sebenarnya, pemerintah berusaha membenahi dan menyusun berbagai macam kebijaksanaan pendidikan yang diharapkan dapat memacu pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian pemerintah membentuk dan menyelenggarakan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan memenuhi kesejahteraan rakyat dalam sektor ketahanan pangan yang dinamakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus diimplementasikan dengan baik supaya tujuan program dapat tercapai. Menurut Gaffar (2009: 295) Implementasi merupakan :

Salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk

non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya yang digunakan hanya untuk membeli beras dan telur di pedagang bahan pangan atau disebut e-warung yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Program Bantuan Pangan Non Tunai diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Presiden sangat mengapresiasi program Bantuan Pangan Non Tunai, karena mampu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong ke arah pembangunan yang berkelanjutan.

Program BPNT merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga.

Program BPNT ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Penyaluran kebutuhan pangan bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga penerima bantuan pangan dalam

memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Di Desa Saguling pada tahun 2020 tercatat jumlah keluarga miskin sebanyak 232 namun belum semua keluarga miskin mendapatkan bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai karena berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan diketahui bahwa hanya 132 keluarga miskin yang memperoleh bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Sumber : Data Desa Saguling, 2021).

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah.

Menurut Gaffar (2009: 295) Implementasi merupakan :

Salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estomologis implementasi adalah :

Sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dari beberapa uraian diatas bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri atau dengan kata lain implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Marham (2018:3) menyatakan bahwa :”Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank, selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan”.

Selanjutnya menurut Kementerian Sosial, (2017:12) menjelaskan bahwa :
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun

elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong Kube PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Himbara. Tujuan Program BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Menurut Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019 (2019:7)

Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang diberikan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga rumah tangga rawan ekonomi, untuk setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik dengan perantara kartu, yang akan mendapatkan tranferan dana yang digunakan langsung untuk membeli dan ditukarkan dengan bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif, yang menurut Sugiyono (2017 : 2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut : "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu."

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, (2014:2) pendekatan kualitatif yaitu "Data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif".

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

a. Akses

1) Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pada intinya pemerintah desa sudah melakukan pendistribusian BPNT terhadap masyarakat penerima manfaat di desa dengan tepat sasaran dan sesuai dengan data yang telah di tetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih kurangnya pendamping desa dan aparatur desa turun untuk melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kelayakan dari masyarakat desa sebagai kelompok sasaran program BPNT, dan hal itu

perlu adanya perhatian dari pemerintah desa dengan mengajak pendamping desa dan aparatur desa untuk secara rutin melakukan survey ke lapangan agar dapat memastikan pendistribusian BPNT dilakukan secara baik dan tepat sasaran sesuai dengan data kelompok sasaran yang telah di tetapkan.

2) Sistem pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai mudah dijangkau oleh kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pemerintah desa dan para pendamping desa harus memperhatikan secara serius cara untuk mendistribusikan BPNT dari pemerintah desa agar tidak menyulitkan terhadap masyarakat kelompok penerima manfaat, karena yang terlihat masih ada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui tempat pendistribusian BPNT, dan hal ini perlu adanya arahan dan pengertian dari pemerintah desa dan pendamping desa sehingga dapat mempermudah terhadap masyarakat penerima manfaat di desa.

3) Adanya penanggungjawab yang jelas dalam program Bantuan Pangan Non Tunai

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini untuk penanggung jawab dalam program BPNT tentunya adalah pemerintah desa dengan dibantu oleh pendamping desa agar dalam pendistribusiannya tepat sasaran dan dilaksanakan secara tepat waktu sehingga dalam pelaksanaannya apabila terjadi kesalahan tidak saling menyalahkan, dan hal ini perlu keseriusan dan tanggung jawab moral

dari semua elemen yang berkepentingan sehingga pada saat ada permasalahan di lapangan tidak saling menyalahkan dan dapat segera di atasi.

4) Tidak adanya diskriminasi kepada kelompok sasaran dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini perlu adanya kejujuran dari pemerintah desa dan para pendamping desa dalam melakukan perivikasi terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat pendistribusian BPNT agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan, walaupun yang terlihat masih ada sebagian masyarakat yang mengadu karena tidak memperoleh pendistribusian BPNT padahal mereka layak untuk mendapatkannya, dan hal itu sudah disampaikan terhadap pemerintah desa agar memperhatikan aduan dari masyarakat sehingga perlu dilakukan survey secara langsung ke masyarakat agar dapat mengetahui secara jelas kelayakan dari masyarakat penerima manfaat sehingga dalam penentuannya tidak ada diskriminasi.

b. Cakupan (coverage),

1) Adanya data seluruh kelompok sasaran untuk memudahkan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini perlunya kecermatan dari pemerintah desa dan pendamping desa dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat kelompok sasaran yang berhak menerima program BPNT

sehingga dapat mempermudah dalam pendistribusiannya di lapangan, namun yang terlihat selama ini masih ada masyarakat kelompok sasaran yang kurang di ketahui oleh pendamping desa sehingga dapat mempersulit untuk mendistribusikan program BPNT di desa oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat yang berkepentingan agar dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi tentang kelompok sasaran yang berhak menerima pendistribusian BPNT.

2) Adanya data kelompok sasaran yang memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai dengan data kelompok yang berhak memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai sebagai perbandingan

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini perlu adanya keseriusan dari pemerintah desa dan pendamping desa dalam melakukan pendataan terhadap kelompok masyarakat yang menerima dengan kelompok masyarakat yang berhak menerima program BPNT dari pemerintah desa, namun masih ada beberapa informasi adanya ketidak sesuaian data dan hal ini perlu adanya keterbukaan dari pemerintah desa dan pendamping desa untuk melakukan perivikasi data secara lebih baik lagi oleh karena itu perlu adanya perhataian yang serius dari pemerintah desa untuk dapat menjelaskan secara terbuka terhadap semua masyarakat di desa

tentang aturan dan kriteria dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima pendistribusian BPNT dari desa karena hal ini menyangkut dengan kepercayaan dari masyarakat.

c. Frekuensi

1) Kemudahan kelompok sasaran dalam mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai dari agen

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pentingnya komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat di desa dalam pendistribusian BPNT dari agen penyalur, namun yang terlihat masih kurangnya informasi terutama terhadap masyarakat yang jauh sehingga kurang mengetahui pendistribusian program BPNT dari agen penyalur, karena itu perlu adanya keaktifan dari pemerintah desa dan pendamping desa untuk melakukan komunikasi yang baik dengan tingkat Rt/Rw sehingga dapat menyampaikan informasi terhadap masyarakat penerima manfaat pendistribusian BPNT terkait dengan pendistribusian BPNT dari agen.

2) Adanya pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai kepada kelompok sasaran secara rutin

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini perlu adanya koordinasi yang baik diantara pemerintah desa dan pendamping desa agar dapat memastikan pendistribusian BPNT dapat tersalurkan secara rutin

dan tepat sasaran, namun yang terlihat selama ini pemerintah desa jarang mengontrol secara langsung ke lapangan padahal hal ini sangat penting untuk mengetahui dan memastikan pendistribusian BPNT tersalurkan secara optimal, oleh karena itu sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah desa agar dapat secara rutin mengontrol secara langsung ke lapangan agar dapat mengetahui dan memastikan pendistribusian BPNT di desa dilaksanakan secara rutin dan tepat sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan.

d. Bias

1) Sistem pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini perlu adanya persamaan persepsi diantara pemerintah desa dan pendamping desa sehingga dapat bersama-sama mengawasi pendistribusian BPNT terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun yang terlihat kurangnya komunikasi dan koordinasi sehingga rentan untuk terjadi penyimpangan dalam penyaluran pendistribusian BPNT oleh karena itu sudah menyarankan terhadap pemerintah desa dan pendamping desa agar tetap melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam melakukan pengawasan terhadap

pendistribusian BPNT di desa sehingga tidak terjadi penyimpangan.

2) Sistem pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai memfokuskan kepada kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini untuk pendistribusian BPNT di desa di khususkan untuk kelompok masyarakat penerima manfaat yang sudah terdaftar dan telah diprivikasi sebagai kelompok sasaran, namun memang masih ada sebagian masyarakat yang layak mendapatkan pendistribusian BPNT ternyata tidak terdata dan hal ini menjadi bahan evaluasi dari pemerintah desa untuk melakukan perivikasi dan survey secara langsung ke masyarakat sehingga dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya dan hal ini akan mempermudah untuk mengetahui kelayakan dari masyarakat untuk dijadikan kelompok sasaran dalam pendistribusian BPNT di desa.

e. Ketepatan layanan (*Service delivery*)

1) Adanya jadwal pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai kepada kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini informasi tentang jadwal untuk pendistribusian BPNT Di desa perlu disampaikan terhadap kelompok sasaran agar dapat mengetahui secara jelas dan hal ini akan mempermudah terhadap kelompok sasaran dalam pendistribusian BPNT dari agen penyalur di desa, namun karena kurang aktifan dari pendamping desa sehingga masih ada sebagian kelompok

sasaran yang kurang mengetahui jadwal pendistribusian BPNT di desa oleh karena itu perlu adanya kesadaran dan keseriusan dari pendamping desa untuk selalu aktif untuk menyampaikan jadwal pendistribusian BPNT Di desa.

2) Sistem pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai telah dilakukan secara tepat waktu

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pada dasarnya pendistribusian BPNT di desa harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan tetapi memang yang terlihat masih adanya keterlambatan dalam melaksanakan pendistribusian BPNT di desa hal ini dikarenakan masih adanya kekurangsiapan dari agen pemasok untuk menyiapkan komoditi yang dibutuhkan dalam pendistribusian BPNT terhadap agen penyalur di desa oleh karena itu perlu adanya ketegasan dan keseriusan dari pemerintah desa dan pendamping desa untuk menegur dan melakukan komunikasi sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pendistribusian BPNT terhadap kelompok penerima manfaat di desa.

3) Sistem pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai mempertimbangkan banyaknya kelompok sasaran pada suatu wilayah

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pada dasarnya pendistribusian BPNT di desa dilaksanakan secara serentak dan dilakukan di warung yang sudah ditunjuk sebagai agen pendistribusian BPNT di desa yang sudah di tetapkan

sehingga terkadang memang tidak mempertimbangkan banyaknya kelompok sasaran di satu tempat karena memang sudah di tentukan sebelumnya.

f. Akuntabilitas

1) Adanya pertanggungjawaban pelaksana dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pendamping desa merupakan pelaksana dalam pendistribusian BPNT di desa sehingga yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendistribusian BPNT terhadap kelompok penerima manfaat di desa, namun terkadang karena ada kesibukan yang lain sehingga kurang fokus dalam melaksanakan pendistribusian BPNT di desa, oleh karena itu perlu adanya komitmen dari pendamping desa untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan pendistribusian BPNT di desa karena hal ini menyangkut dengan kepercayaan dari masyarakat.

2) Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai kepada kelompok sasaran sesuai dengan data target penerima

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pendistribusian BPNT di desa memang belum sepenuhnya mendapatkan sesuai dengan target yang di inginkan oleh pemerintah desa, hal ini karena adanya jatah dari Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan ajuan dari pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaannya perlu melakukan skala prioritas terhadap masyarakat yang

benar-benar memerlukan sehingga perlu adanya penjelasan terhadap masyarakat penerima manfaat di desa karena hal ini merupakan kepercayaan dari masyarakat.

3) Adanya bukti pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai kepada kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini dalam pendistribusian BPNT di desa harus menyertakan kartu sebagai bukti pembelian sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan perhatian dari pendamping desa sebagai pelaksana di lapangan, karena masih adanya sebagian masyarakat penerima manfaat pendistribusian BPNT di desa yang tidak menyertakan kartu sebagai penerimaan pendistribusian BPNT di desa oleh karena itu perlu adanya penjelasan secara terperinci terhadap masyarakat penerima manfaat pendistribusian BPNT di desa sehingga dapat memahaminya.

4) Adanya laporan rutin yang disampaikan oleh agen kepada Dinas sosial secara rutin

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pelaksanaan pendistribusian BPNT di desa perlu adanya laporan secara rutin dari agen penyalur terhadap Dinas Sosial dan hal ini perlu adanya perhatian, namun terkadang masih kurangnya perhatian sehingga laporan pendistribusian BPNT di desa belum dilaporkan secara rutin, oleh karena itu perlu adanya komunikasi dari pemerintah desa dan pendamping desa agar dapat

memberikan pengertian dan pemahaman terkait dengan pentingnya laporan pertanggung jawaban pendistribusian BPNT di desa.

5) Adanya pengawasan dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai kepada kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pengawasan pelaksanaan pendistribusian BPNT di desa sangat penting agar dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan, namun yang terlihat masih kurangnya pendamping desa untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendistribusian BPNT di desa sehingga kurang mengetahui kondisi yang sebenarnya, oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari pendamping desa untuk secara rutin turun langsung ke lapangan agar dapat memastikan pelaksanaan pendistribusian BPNT di desa dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang telah ditetapkan.

g. Kesesuaian program dengan kebutuhan

1) Adanya identifikasi kebutuhan dari kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini seharusnya ada identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa karena memang yang memerlukan adalah masyarakat penerima manfaat, tetapi memang terkadang komoditi yang di distribusikan sudah ditentukan tanpa adanya identifikasi terlebih dahulu dari pendamping desa sehingga

masih ada komoditi yang tidak dibutuhkan tetapi terpaksa harus di ambil, oleh karena itu perlu adanya kepekaan dari pendamping desa untuk melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dari penerima manfaat di desa sehingga komoditi bahan pokok yang di distribusikan benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat penerima manfaat di desa.

2) Volume pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pendistribusian BPNT di desa sudah di direncanakan secara matang dengan berdasarkan kebutuhan dari banyaknya anggota kelompok masyarakat penerima manfaat di desa, namun memang terkadang hal itu sudah ditentukan tanpa melihat dari banyaknya anggota keluarga dari kelompok masyarakat penerima manfaat di desa sehingga kurang memikirkan tingkat kecukupannya, oleh karena itu perlu adanya perhatian secara matang agar dalam pendistribusian BPNT dapat di sesuaikan dengan banyaknya kebutuhan dari kelompok masyarakat penerima manfaat di desa.

3) Pendistribusian disesuaikan dengan pemesanan dari kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pendistribusian BPNT di desa memang seharusnya di sesuaikan dengan pesanan dari kelompok masyarakat penerima

manfaat di desa agar sesuai dengan kebutuhannya, namun memang komoditi yang di distribusikan terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat di desa sudah di tentukan sehingga terkadang kurang sesuai dengan kebutuhannya, oleh karena itu harus adanya identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa sehingga dalam pendistribusiaannya dapat di sesuaikan dengan kebutuhannya.

4) Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai dapat memberikan manfaat kepada kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pendistribusian BPNT di desa sangat membatu terhadap kelompok pernerima manfaat di desa karena dengan situasi dan kondisi sekarang memang banyak yang kesulitan untuk menjalankan usahanya, sehingga dengan adanya pendistribusian BPNT di desa sangat bermanfaat bagi kelompok masyarakat penerima manfaat di desa oleh karena ituperlu adanya perhatian secara serius agar dalam pelaksanaannya tidak ada penyelewengan karena hal ini menyangkut dengan kepercayaan dari masyarakat.

5) Adanya sanksi yang diberikan kepada agen jika tidak sesuai dalam melaksanakan penditribusian Bantuan Pangan Non Tunai

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini pendistribusian BPNT di desa sudah adanya aturan dan

mekanisme yang jelas sehingga dapat mempermudah terhadap agen penyalur dalam mendistribusikan BPNT di desa, namun memang masih adanya kesalahan dan keterlambatan dalam mendistribusikan BPNT terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat di desa oleh karena itu perlu adanya sanksi yang tegas terhadap agen penyalur apabila adanya ketidaksesuaian dalam pendistribusian BPNT di desa.

6) Adanya keseragaman harga jual kepada kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa selama ini dalam pendistribusian BPNT di desa sudah disamaratakan sehingga dalam menjual harga komoditi terhadap kelompok penerima manfaat di desa sudah sama dan tidak ada yang dibedakan karena memang produk dan banyaknya juga sama, dan hal ini adapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pendamping desa dalam pendistribusian BPNT di desa.

KESIMPULAN

Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil wawancara diketahui belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Purwanto dan Sulystiastuti (2014:106) tentang indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas implementasi kebijakan hal ini dikarenakan, kurangnya pendamping desa dan aparatur desa turun untuk melakukan

survey ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kelayakan dari masyarakat desa sebagai kelompok sasaran, masih ada sebagian masyarakat yang mengadu karena tidak memperoleh pendistribusian BPNT padahal mereka layak untuk mendapatkannya, kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa untuk melakukan perivikasi data terhadap kelompok sasaran yang berhak menerima pendistribusian BPNT di desa, kurangnya komunikasi dan koordinasi sehingga rentan untuk terjadi penyimpangan dalam penyaluran pendistribusian BPNT di desa, masih adanya keterlambatan dalam melaksanakan pendistribusian BPNT di desa hal ini dikarenakan masih adanya kekurangsiapan dari agen pemasok untuk menyiapkan komoditi yang dibutuhkan dalam pendistribusian BPNT terhadap agen penyalur di desa, oleh karena itu maka pemerintah desa sudah mengajak pendamping desa dan aparatur desa untuk secara rutin melakukan survey ke lapangan agar dapat memastikan pendistribusian BPNT dilakukan tepat sasaran sesuai dengan data kelompok sasaran yang telah di tetapkan, dan pemerintah desa sudah melakukan perivikasi data terhadap masyarakat penerima manfaat di desa dengan melakukan survey secara langsung ke masyarakat agar dapat mengetahui secara jelas kelayakan dari masyarakat penerima manfaat sehingga dalam penentuannya tidak ada diskriminasi serta pemerintah desa sudah menjelaskan secara terbuka

terhadap semua masyarakat di desa tentang aturan dan kriteria dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima pendistribusian BPNT dari desa, sudah adanya koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BPNT di desa sehingga tidak terjadi penyimpangan, serta pemerintah desa secara tegas sudah memberikan teguran sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pendistribusian BPNT terhadap kelompok penerima manfaat di desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat hambatan-hambatan yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, dimana hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pendamping desa melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kelayakan dari masyarakat desa sebagai kelompok sasaran program BPNT
2. Pendistribusian BPNT yang belum merata terhadap sebagian masyarakat kelompok sasaran di desa
3. Masih ada sebagian masyarakat yang mengadu karena tidak memperoleh pendistribusian BPNT padahal mereka layak untuk mendapatkannya, dan hal itu sudah disampaikan terhadap pemerintah desa agar memperhatikan aduan dari masyarakat

4. Masih ada masyarakat kelompok sasaran yang kurang di ketahui oleh pendamping desa sehingga dapat mempersulit untuk mendistribusikan program BPNT di desa
 5. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa dan pendamping desa untuk melakukan perivikasi data terhadap kelompok sasaran yang berhak menerima pendistribusian BPNT di desa
 6. Kurangnya informasi terutama terhadap masyarakat yang jauh sehingga kurang mengetahui pendistribusian program BPNT dari agen penyalur
 7. Pemerintah desa jarang mengontrol secara langsung ke lapangan padahal hal ini sangat penting untuk mengetahui dan memastikan pendistribusian BPNT tersalurkan secara optimal
 8. Kurangnya komunikasi dan koordinasi sehingga rentan untuk terjadi penyimpangan dalam penyaluran pendistribusian BPNT di desa
 9. Kekurang aktifan dari pendamping desa sehingga masih ada sebagian kelompok sasaran yang kurang mengetahui jadwal pendistribusian BPNT di desa
 10. Masih adanya keterlambatan dalam melaksanakan pendistribusian BPNT di desa hal ini dikarenakan masih adanya kekurangiapan dari agen pemasok untuk menyiapkan komoditi yang dibutuhkan dalam pendistribusian BPNT terhadap agen penyalur di desa
 11. Adanya kesibukan yang lain sehingga kurang fokus dalam melaksanakan pendistribusian BPNT di desa
 12. Masih kurangnya pendamping desa untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendistribusian BPNT di desa sehingga kurang mengetahui kondisi yang sebenarnya
 13. Kurangnya pendamping desa melakukan identifikasi terhadap keinginan dan kebutuhan kelompok masyarakat penerima manfaat di desa
- Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Saguling Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis antara lain :
1. pemerintah desa dengan mengajak pendamping desa untuk melakukan survey ke lapangan agar dapat memastikan pendistribusian BPNT dilakukan secara baik dan tepat sasaran sesuai dengan data kelompok sasaran yang telah di tetapkan
 2. Sudah memberikan arahan terhadap pendamping desa agar dapat merangkul semua kelompok sasaran agar dapat mempermudah untuk menyampaikan informasi tentang tempat pendistribusian BPNT di desa yang tidak jauh dari sekitar desa
 3. Sudah adanya perivikasi data terhadap masyarakat penerima

- manfaat di desa dengan melakukan survey secara langsung ke masyarakat agar dapat mengetahui secara jelas kelayakan dari masyarakat penerima manfaat sehingga dalam penentuannya tidak ada diskriminasi dan dilakukan secara merata
4. Melakukan komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat yang berkepentingan agar dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi tentang kelompok sasaran yang berhak menerima pendistribusian BPNT
 5. Pemerintah desa sudah menjelaskan secara terbuka terhadap semua masyarakat di desa tentang aturan dan kriteria dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima pendistribusian BPNT dari desa
 6. Pemerintah desa dan pendamping desa sudah pro aktif untuk melakukan komunikasi yang baik dengan tingkat Rt/Rw sehingga dapat menyampaikan informasi terhadap masyarakat penerima manfaat pendistribusian BPNT terkait dengan pendistribusian BPNT dari agen
 7. Pemerintah desa sudah berusaha untuk selalu mengontrol secara langsung ke lapangan agar dapat mengetahui dan memastikan pendistribusian BPNT di desa dilaksanakan secara rutin dan tepat sasaran
 8. Pemerintah desa dan pendamping desa selalu melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BPNT di desa sehingga tidak terjadi penyimpangan
 9. Berusaha meningkatkan kesadaran dan keseriusan dari pendamping desa untuk selalu aktif untuk menyampaikan jadwal pendistribusian BPNT di desa
 10. Pemerintah desa dan pendamping desa secara tegas memberikan teguran sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pendistribusian BPNT terhadap kelompok penerima manfaat di desa
 11. Pemerintah desa sudah melakukan komunikasi terhadap pendamping desa agar memiliki komitmen yang jelas dalam pelaksanaan pendistribusian BPNT di des
 12. Berusaha meningkatkan kesadaran dari pendamping desa untuk secara rutin turun langsung ke lapangan agar dapat memastikan pelaksanaan pendistribusian BPNT di desa dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang telah ditetapkan
- Sudah adanya kepekaan dari pendamping desa untuk mendengarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di desa sehingga dapat mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan dalam pendistribusian BPNT di desa

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Erwan, Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. harapan
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : APII Bandung
- Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018
- Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019